

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING**

### **COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING STUNTING**

**Nindya Tiara Fatikha<sup>\*</sup>, Ane Permatasari**

Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>\*</sup>Koresponden email: [nindya.tiara.isip20@mail.umy.ac.id](mailto:nindya.tiara.isip20@mail.umy.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Stunting pada bayi menjadi permasalahan krusial yang masih dihadapi Indonesia sehingga memerlukan langkah dalam upaya penanganannya. Penanganan stunting di Indonesia tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Namun, dalam kolaborasi tersebut, peran kementerian dan lembaga menjadi yang terdepan dalam penanganan stunting di Indonesia. Tujuan penelitian pada artikel ini yaitu untuk mengetahui *collaborative governance* antara kementerian dan lembaga-lembaga dalam upaya penanganan stunting di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan sumber data sekunder. Teknik analisis data menggunakan interactive model yang didasarkan pada dinamika *collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kolaborasi, seperti Kemenkes, Kemenag, Kemensos, BKKBN, BPOM, dan lain-lain. Peran yang dilakukan melalui kolaborasi tersebut memiliki dampak pada penurunan stunting di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi antara kementerian dan lembaga telah dilakukan dengan baik, tetapi perlu adanya pengembangan lanjutan. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa zero stunting akan dapat dicapai apabila kementerian dan lembaga mengikutsertakan dan mengoptimalkan peran pihak lain non-pemerintah dalam penanganan stunting.

**Kata kunci:** *Collaborative governance; kementerian; lembaga; stunting*

#### **ABSTRACT**

*Stunting in infants is a crucial problem that is still being faced by Indonesia so it requires steps in efforts to handle it. Handling stunting in Indonesia is not only the government's task, but also requires cooperation from all parties. The research objective in this article is to find out collaborative governance between ministries and institutions in efforts to tackle stunting in Indonesia. This article uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques with literature study and secondary data sources. The data analysis technique uses an interactive model based on the dynamics of collaborative governance according to Emerson and Nabatchi. The results of the research show that there are various ministries and institutions involved in the collaboration, such as the Ministry of Health, Ministry of Religion, Ministry of Social Affairs, BKKBN, BPOM, and others. The role carried out through this collaboration has had an impact on reducing stunting in Indonesia. This research concludes that the implementation of collaboration between ministries and agencies has been carried out well, but further development is needed. This research implies that zero stunting can be achieved if ministries and agencies involve and optimize the role of other non-government parties in handling stunting.*

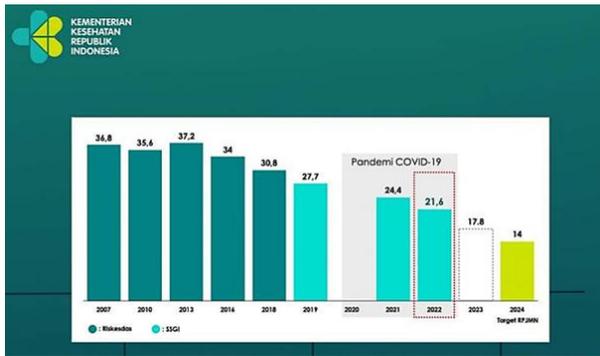
**Keywords:** *Collaborative governance; ministries; institutions; stunting*

#### **PENDAHULUAN**

Persoalan stunting merupakan persoalan besar yang berskala nasional dikarenakan tingginya angka tersebut di Indonesia, dimana hal ini mengarah pada Perpres dan kebijakan pembangunan di Bappenas (Apriska et al., 2022). Terkait dengan program SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 memiliki tujuh perencanaan terhadap pembangunan yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.

Stunting merupakan suatu keadaan yang dilihat dari tinggi badan seorang bayi lebih pendek dengan bayi yang lain, atau dikenal gagal tumbuh. Penyebab stunting ini dikarenakan oleh nutrisi atau

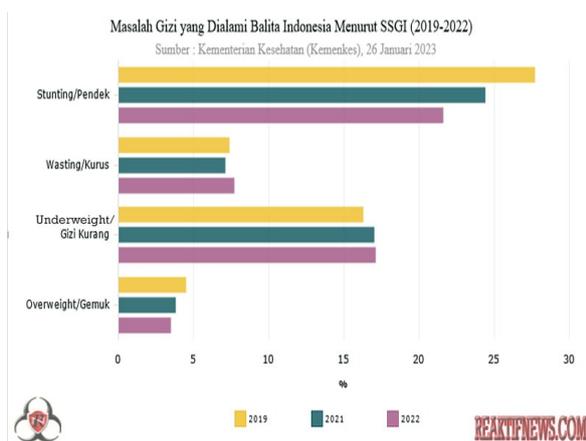
gizi yang dikonsumsi oleh bayi dalam waktu 1000 hari pertama sangat kurang, yang mana dalam hal ini dapat mengakibatkan kematian. Berdasarkan persoalan ini, Indonesia sebagai salah satu dari banyak negara yang memiliki nilai tinggi daripada negara dengan pendapatan menengah lainnya dalam prevalensi stunting (Widaryanti, 2019). Di Indonesia, sekitar 30,8% anak di bawah 5 tahun masih terpengaruh stunting, yang mana lebih tinggi dari rata-rata wilayah Asia yaitu 21,8% (Global Nutrition Report, 2023). Untuk itu, Indonesia bertekad menurunkan kondisi ini dengan mencapai penurunan sebesar 14% pada tahun 2024.



**Gambar 1.** Prevalensi Stunting di Indonesia (Kemenkes RI, 2023)

Prevalensi stunting di Indonesia menurun yakni pada tahun 2021 sebesar 24,4% menjadi 21,6% pada tahun 2022 (UPK Kemenkes RI, 2021). Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 2,8%. Hasil pencapaian tersebut selaras dengan sasaran yang digalakkan oleh Kemenkes yakni sekitar 2,7% menurun disetiap tahunnya. Apabila dilihat dari tahun 2007 sampai 2018, prevalensi kasus stunting turun hanya mencapai 6% dalam 11 tahun terakhir. Selain itu, persen prevalensi stunting juga cenderung fluktuatif dimana turun pada tahun 2010, naik di tahun 2013, dan turun kembali pada tahun 2018.

Berdasarkan gambar di atas, angka stunting di Indonesia memang terjadi penurunan dari tahun ke 2021-2022. Namun, stunting menjadi masalah gizi yang paling tinggi terjadi oleh balita di Indonesia. Sebagaimana pada data dibawah ini:



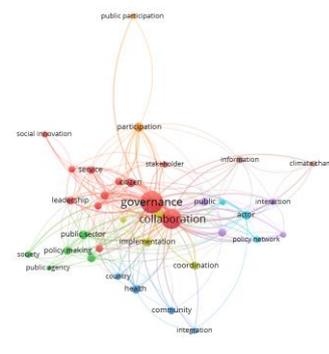
**Gambar 2.** Survei Status Gizi Indonesia (Kemenkes, 2023)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa stunting menjadi salah satu permasalahan gizi pada balita yang perlu memperoleh perhatian dari semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan prevalensi angka stunting yang masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 sebesar 21,6%. Dimana angka tersebut di atas batas yang di-

tetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebesar 20% (Asri, 2023). Hal ini membuktikan bahwa stunting di Indonesia masih dalam kategori masalah yang krusial sehingga perlu adanya penanganan dari semua pihak.

Berdasarkan hasil pelaporan UNICEF, WHO, dan World Bank, pada tahun 2020 diperhitungkan kira-kira terdapat 149,2 juta anak atau senilai dengan 22% yang berada di dunia merasakan stunting (Apriska et al., 2022). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwasannya dalam pengendalian masalah kesehatan diperlukan keterikatan terhadap kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam usaha penanggulangan stunting di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari lapisan masyarakat (Damayanti et al., 2021). Pemerintah Indonesia juga menyinergikan antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi permasalahan stunting. Kolaborasi tersebut mulai dari Kemenkes, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, Ristekdikti, Kementerian Perdagangan, Kemensos, BKKBN, hingga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan kementerian dan lembaga lainnya dalam menggapai tujuan SDGs nomor dua (Saputri & Tumangger, 2019).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk memahami dan mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana peran kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti menggunakan perspektif *collaborative governance*.



**Gambar 3.** Analysis *Public Policy* and *Collaborative Governance* Themes (Vos Viewers, 2023)

Berdasarkan pada hasil analisis VOS Viewer yang berkaitan dengan keyword *Public Policy* and *Collaborative Governance* pada analysis database menunjukkan bahwa pembahasan yang berkaitan dengan tema terkait hanya terfokus pada satu cluster saja. Dalam hal ini terdapat pada cluster 1 dengan adanya keyword *Collaboration*, *Governan-*

ce, dan *Policy Process*. Sedangkan pada cluster yang lain belum menunjukkan atau belum memiliki hubungan dengan topik *Collaborative Governance*, terutama tidak ada keterkaitan dengan topik yang mengacu pada kolaborasi dari kementerian dan lembaga khususnya dalam penanganan stunting. Hal ini menunjukkan kurangnya penelitian terkait *collaborative governance* antar kementerian dan lembaga dalam penanganan stunting di Indonesia. Dengan demikian, hal ini menjadi suatu *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini yang berfokus pada peran kementerian dan lembaga dalam penanganan stunting di Indonesia melalui perspektif *collaborative governance*.

Adanya kesenjangan pada dinamika *collaborative governance* dalam penanggulangan stunting yang ditandai dengan kewajiban hukum sektor swasta untuk memfokuskan penanganan stunting masih lemah, kepemimpinan kolaboratif terpusat, dan akomodasi dukungan sumberdaya dari pihak eksternal, seperti ormas, swasta, perguruan tinggi, dan media lemah (Saufi, 2021). Konsep *collaborative governance* menurut Ansell and Gash menemukan bahwa belum efektifnya *collaborative governance* dalam mengelola kampung wisata yang disebabkan penyelenggaraan desa wisata dipengaruhi oleh unsur internal dan eksternal, antara lain aspek budaya, kelembagaan pengelola, anggaran, letak geografis, masyarakat, dan SDM (Molla et al., 2021). Selain itu, konsep kolaborasi dalam penanganan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula melalui teori Ansell and Gash belum berjalan dengan baik karena pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi atau universitas belum dilibatkan, serta minimnya sumberdaya dari bagian anggaran dan peralatan (Umabaihi et al., 2022).

Sedangkan konsep *collaborative governance* melalui pendekatan pentahelix menunjukkan hasil adanya peningkatan penyebaran kasus covid-19 di Kota Padang (Putera et al., 2020). Selaras dengan studi yang menerapkan enam kriteria tata kelola kolaboratif penta-helix, yang memenuhi lima kriteria dan gagal memenuhi kriteria keterlibatan penuh selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi stunting di Jawa Barat memiliki kerangka kerja yang mengakomodir tata kelola kolaboratif, namun implementasinya masih jauh dari harapan (Afandi et al., 2021).

Teori tata kelola kolaborasi Ansell dan Gash menemukan bahwa proses kolaboratif penanganan stunting di UPTD Puskesmas Champel telah berhasil, dilihat dari keterlibatan swasta dan masyarakat (Ipan et al., 2021). Selain itu, *collaborative governance* dalam penanggulangan stunting menurut teori Ansell dan Gash sudah efektif di-

buktikan dengan menurunnya angka stunting akibat kegiatan kelas stunting yang dilaksanakan setiap sebulan sekali (Putri & Nurcahyanto, 2021).

Teori *collaborative governance* Emerson dan Nabatchi menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pencegahan penyebaran tuberkulosis rumah sakit paru Jawa Barat belum memenuhi konsep dinamika kolaborasi Emerson dan Nabatchi karena belum berjalannya kolaborasi secara sinergi dengan LSM atau masyarakat (Mustiasih, 2022). Sejalan dengan teori dari Emerson dan Nabatchi yang menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan hanya bersifat formalisme untuk memenuhi tuntutan dari pemerintah pusat serta program yang dikerjakan oleh OPD mempunyai sasaran dimana satu dengan yang lainnya tidak saling terkait sehingga dapat dilihat bahwa kinerja tim koordinasi penanggulangan stunting hanya diukur dari kinerja dinas kesehatan (Candarmaweni & Rahayu, 2020).

Pelaksanaan tata kelola kolaboratif diukur dengan dinamika kolaborasi, hasilnya tata kelola kolaboratif dalam mengatasi stunting di Kecamatan Berbah sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan penurunan angka stunting. Namun, terdapat beberapa kendala seperti belum tersedianya forum komunikasi di kecamatan, keterbatasan alokasi anggaran, minimnya partisipasi swasta dan perguruan tinggi, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat (Permatasari et al., 2022). Selain itu, konsep dinamika kolaborasi menyebutkan bahwa *collaborative governance* dalam mencegah penyakit HIV dan AIDS di Jakarta sesuai dengan konsep dinamika kolaboratif. Namun, masyarakat, LSM, dan pemerintah memiliki pemahaman berbeda tentang prinsip dan prosedur tata kelola kolaboratif yakni pada bagian determinasi yang masih terbatas (Fauzi & Sri Rahayu, 2019).

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, belum terdapat penelitian yang memakai studi kasus tentang kolaborasi yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam penanggulangan stunting di Indonesia. Adapun *novelty* atau kebaruan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya yaitu peneliti memakai konsep dinamika *Collaborative Governance* menurut Emerson dan Nabatchi yang meliputi keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama untuk dianalisis terhadap pelaksanaan proses kolaborasi yang dilaksanakan terhadap kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan stunting di Indonesia (Mustiasih, 2022)

Tingginya angka stunting di Indonesia membuat peneliti tertarik meneliti masalah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti bertujuan meneliti tentang

*collaborative governance* kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia. Peneliti membahas tentang bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan stunting di Indonesia dengan menggunakan konsep *collaborative governance*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan melakukan setting di kehidupan nyata untuk menyelidiki dan mengetahui kejadian yang terjadi (Chariri, 2009). Jenis penelitian yang digunakan merupakan deskriptif. Teknik deskriptif merupakan penggambaran suatu keadaan yang terjadi secara aktual saat penelitian berlangsung (Surya Dharma, MPA., 2008). Pada penelitian ini, Peneliti akan mengkaji dan mendeskripsikan *collaborative governance* lembaga dan kementerian dalam upaya penanganan stunting di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan sumber data sekunder dengan sumber utamanya yaitu artikel jurnal, buku, dan studi perpustakaan lain berupa dokumen terkait penelitian. Studi kepustakaan merupakan aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian, yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, *literature*, dan penulis untuk memperoleh informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti memiliki landasan teori kuat dalam hasil ilmiah (Moto, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model* menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian dideskripsikan berdasarkan dinamika *Collaborative Governance* menurut Emerson dan Nabatchi (Mustiasih, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting Keterlibatan Berprinsip

Emerson dan Nabatchi menyatakan keterlibatan berprinsip didefinisikan sebagai masalah dan solusi alternatif (Candarmaweni & Yayuk Sri Rahayu, 2020). Prinsip keterlibatan difokuskan pada bagaimana menciptakan keterlibatan antar aktor dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan *goals* bersama dan keterlibatan berprinsip, aktor-aktor dengan perspektif yang berbeda dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan (Mustiasih, 2022). Adapun keterlibatan kementerian dan lembaga dalam berkolaborasi

penanggulangan stunting yakni pemerintah Indonesia melakukan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi permasalahan stunting. Kolaborasi tersebut mulai dari Kemenkes, Kementerian Kominfo, Ristekdikti, Kemensos, Kemenag, BKKBN, TNP2K, hingga BPOM dan kementerian dan lembaga lainnya (Satriawan, 2018).

Kementerian Kesehatan sebagai pelopor dalam penanggulangan masalah stunting telah melaksanakan berbagai langkah dan cara guna mencapai penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Cara tersebut berupa perbaikan gizi secara eksklusif, proses menangani masalah kurang gizi, penambahan gizi berupa pemberian vitamin, kelas untuk ibu hamil, penyuluhan kepada calon ibu untuk pemberian ASI eksklusif, gerakan gizi seimbang, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kemenkes, 2018). Penyelesaian masalah stunting harus dilaksanakan dengan berbagai cara terintegrasi dan kolaboratif oleh berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan (Kemenkeu RI, 2022). Oleh karena itu, Kemenkes berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga.

Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian dalam hal bahan pangan tambahan agar dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Dalam pengawasan keamanan pangan, Kemenkes berintegrasi terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, BPOM, dan Kementerian Kominfo dalam menjaga keamanan dan kualitas makanan, sertifikasi labelisasi halal, dan promosi bahan pangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendukung dengan adanya pengadaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang berupa program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Kementerian PUPR, 2019).

TNP2K yang berkolaborasi dengan kemenkes melalui programnya dalam penanganan stunting yakni intervensi gizi secara spesifik yang diarahkan untuk anak atau balita dalam seribu (1000) hari pertama kehidupan seperti pemberian nutrisi dan vitamin untuk ibu hamil, adanya imunisasi, dan lain-lain (TNP2K & Indonesia, 2018). Selain itu, intervensi gizi yang sensitif. Dimana untuk intervensi gizi sensitif ini dengan beberapa aktivitas pembangunan di luar bidang kesehatan yakni penyediaan layanan kesehatan, air bersih, dan lain-lain (TNP2K & Indonesia, 2018). Kemudian, Kemensos juga mendukung dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) dan pembangunan prasarana kepada sejumlah keluarga yang tidak berkemampuan. Selain itu, bantuan pangan berupa beras yang telah diberikan penambahan zat atau nutrisi penting agar gizi warga dapat terpenuhi dengan baik.

Kemensos melalui Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) meningkatkan kualitas SDM kepada pendamping PKH melalui pemberian bahan ajar atau buku cetak terkait stunting dalam pendidikan dan pelatihan. Kementerian Desa dan PDTT mempunyai kewenangan pada penyaluran anggaran desa untuk pembangunan prasarana dasar yang berguna pada perbaikan kehidupan masyarakat, seperti membangun sumur, air bersih, MCK, polindes, dan posyandu (Kementerian Desa dan PDTT, 2021).

Kemdikbud memosisikan penanganan stunting sebagai agenda utama di tingkat PAUD melalui terbentuknya PAUD Holistik Integratif dan peningkatan kompetensi guru PAUD (Kemendikbud, 2020). PAUD merupakan usia yang emas dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, terdapat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang berkolaborasi dengan Kampus Siaga Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Gizi (AIPGI) (Ditjen Dikti, 2021).

Kementerian Kominfo melalui caranya dalam penyebaran informasi mengenai stunting memberikan program, sebagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia dengan media yang kuat. Pentingnya media informasi dalam melakukan pemanfaatan untuk memberikan informasi yang aktual, terpercaya, dan berkualitas bagi masyarakat. Media menjadi dasar atau fondasi bersama dengan melibatkan seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat untuk melakukan penyebaran informasi yang berkaitan dengan stunting. Kementerian Kominfo bertekad untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan stunting, gizi atau nutrisi, dan pertumbuhan dan atau perkembangan pada anak, baik melalui forum GenBest, yang dapat dibuka melalui website yang bernama genbest.id, akun medsos @genbestid dan @info-kompmk, serta terdapat aplikasi yang dapat diunggah melalui android yaitu Aplikasi Anak Sehat (Kominfo, 2019).

Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenkes, BKKBN, Kemenkeu, dan Setwapres dalam menetapkan seluruh kabupaten/kota sebagai lokus tahun 2022 sebagai langkah untuk melakukan penurunan angka stunting secara global di daerah dengan stunting tinggi (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Sementara

Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) juga mendukung dengan membuat kebijakan bahwa bagi calon pengantin, sebelum melangsungkan pernikahan, tiga bulan sebelumnya dihimbau untuk lapor ke KUA dan melakukan *check-up*. Apabila terdapat masalah seperti anemia atau kurang gizi maka dianjurkan untuk menunda kehamilan demi kesehatan dan keselamatan pada ibu dan bayi sampai dengan nustrisi dan gizinya terpenuhi (Kementerian Agama, 2023).

Kementerian Keuangan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga dalam persediaan dana untuk penanggulangan stunting. Melalui cara memberdayakan APBN, APBD, dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kemenkeu RI, 2022). Dalam usaha melindungi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak Indonesia, pemerintah terus berusaha dalam peningkatan mutu SDM di Indonesia dan mencegah peningkatan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan dukungan anggaran. APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga dalam mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak yaitu sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023 (Kemenkeu, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan kementerian dan lembaga dalam penanggulangan dan pencegahan stunting. Tidak hanya kementerian dan lembaga di Indonesia, tentu ada keterlibatan juga dengan swasta, akademisi, perguruan tinggi, masyarakat, bahkan kerjasama dengan institusi asing dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia. PT Holland for Water (NAZAVA) dan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) bekerjasama dalam status gizi terutama pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dan ketersediaan air minum layak dan bersih sehingga harapannya dapat menekan kasus stunting (Community, 2016). Dengan demikian, proses kolaborasi sudah terlaksana dengan baik sehingga untuk menuju zero stunting semua pihak harus bersama-sama mengupayakan dan mengoptimalkan langkah pencegahan stunting.

### **Motivasi Bersama**

Motivasi bersama merupakan alur dalam menguatkan individu yang terwujud dari komponen yakni kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen (Mus-

tiasih, 2022). Implementasi kolaborasi dalam penanganan stunting di Indonesia adanya kepercayaan bersama. Dalam kerjasama terdapat kriteria tertentu yang harus diperhatikan, yaitu adanya kepercayaan dan aksesibilitas (Ismail et al., 2023). Selain itu, penelitian lain mengemukakan bahwa adanya kepercayaan juga menjadi salah satu hal penting dalam proses kolaborasi (Maylani & Mashur, 2019). Dalam penerapannya, hal ini dilihat dengan adanya komunikasi yang sering dilakukan sehingga memperkuat kepercayaan antar kementerian dan lembaga, seperti kolaborasi Kemenkes dengan Kemensos, bahkan dengan lembaga-lembaga seperti TNP2K, BPOM, dan lain-lain.

Ansell & Gash mengemukakan bahwa para pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang sama dari adanya kolaborasi, seperti visi dan misi, tujuan, dan kesesuaian masalah (Setiawandari & Kriswibowo, 2023). Selanjutnya, penelitian lain menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan juga harus meningkatkan pemahaman bersama terkait yang akan dicapai bersama (Bustomi et al., 2022). Adapun pihak yang terlibat dalam penanganan stunting ini adalah kementerian dan lembaga di Indonesia yang sudah cukup mengerti terhadap tugas, kemampuan, dan fungsinya dari setiap pihak tersebut. Dalam penerapannya, hal ini dibuktikan dengan keselarasan langkah, kebijakan, program yang diselenggarakan oleh setiap kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, bentuk usaha lain dalam meningkatkan pemahaman bersama yaitu adanya koordinasi dan musyawarah yang dibuktikan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga (Menpan, 2023). Dengan begitu, dapat meningkatkan usaha dalam menekan angka stunting di Indonesia.

Legitimasi internal yaitu pengakuan yang bermula dari internal kerja sama, dalam hal ini pihak-pihak yang turut bersinergi dan berkolaborasi diharapkan bisa meyakinkan dan jujur pada kepentingan bersama (Arrozaaq, 2016). Dalam pelaksanaannya, legitimasi internal dilihat dari proses kerjasama yang berjalan. Kerjasama yang dilaksanakan masing-masing pihak sudah cukup baik, dilihat dengan adanya sosialisasi, rapat, bahkan pelatihan yang dilaksanakan. Misalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkes bekerja sama dengan Germas dalam mempercepat turunnya angka stunting (Kementerian Kesehatan, 2023).

Dalam *collaborative governance*, terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa komitmen merupakan suatu bentuk keyakinan adanya tata

kelola kolaboratif yang dapat menciptakan manfaat untuk setiap pihak dan kepentingan masyarakat (Arifin & Utami, 2018). Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa bentuk komitmen dari para pemangku kepentingan dapat dilihat melalui adanya bentuk kerjasama dan saling membantu untuk mencapai tujuan (Mafaza & Setyowati, 2020). Dalam penerapannya, hal ini dibuktikan bahwa antar kementerian dan lembaga-lembaga memiliki visi, misi, tujuan, serta cita-cita yang selaras yaitu penanganan dan penurunan angka stunting di Indonesia. Selain itu, adanya kesesuaian program atau aktivitas yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai di tingkat paling bawah dalam penanganan stunting. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sudah tercipta motivasi bersama dalam penanganan stunting. Namun, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan lagi untuk mencapai *zero stunting*.

#### **Kapasitas Aksi Bersama**

Kapasitas dalam melaksanakan aksi bersama terdiri atas unsur-unsur yakni prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya (Mustiasih, 2022). Emerson dan Nabatchi mengungkapkan bahwa prosedur dan kesepakatan institusi terdapat susunan berjarangan dan pelaksanaan, dikarenakan apabila suatu lembaga kolaborasi mampu terwujud sehingga dibutuhkan konsep kepemimpinan kolaboratif (Mustiasih, 2022). Selain itu, Molla berpendapat bahwa regulasi merupakan kekuasaan yang digunakan suatu lembaga untuk mengatur aktivitas dalam kekuasaan mereka (Setiawandari & Kriswibowo, 2023). Dalam penerapannya, hal ini dilihat dengan adanya kesepakatan kerjasama, seperti Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam pendampingan program pencegahan dan penanggulangan stunting (SPKO Kemenkes, 2019).

Vagen Maintaning dan Huxman (2003) mengungkapkan bahwa kepemimpinan digunakan sebagai langkah memberdayakan dan memobilisasi para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan proses kolaborasi (Setiawandari & Kriswibowo, 2023). Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan dilihat dengan adanya peran pemimpin dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang berhubungan dengan stunting seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta adanya kebijakan yang mempunyai keterkaitan dengan stunting yakni Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Selanjutnya, pengetahuan yang mana iptek sudah membawa kemajuan pesat dalam kehidupan, dengan mencari berbagai informasi di media sosial akan memperoleh banyak literasi ilmu yang juga mudah diakses (Hendriana & Subarkah, 2023). Selaras dengan pelaksanaannya, pengetahuan berupa penyaluran informasi yang berkaitan dengan stunting dan dilaksanakan oleh pihak terkait seperti Kementerian Kominfo dengan memakai banyak media sehingga dapat dijangkau masyarakat dengan mudah, seperti website, instagram, youtube, dan lain-lain. Informasi yang diberikan seperti prevalensi stunting di Indonesia, faktor penyebab kasus stunting, cara mencegah stunting mulai dari pola makan, pola asuh, dan lain-lain. Oleh sebab itu, masyarakat di Indonesia bisa membaca dan mengerti informasi yang berkaitan terhadap stunting lebih banyak dan mendalam. Pengetahuan juga dapat disalurkan berupa pertemuan atau rapat dalam menyampaikan hasil yang dicapai oleh para pihak terkait.

Van Metter dan Van Horn mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya, baik kualitas manusia, ketersediaan anggaran, dan peralatan (Sutami et al., 2020). Selain itu, penelitian lain berpendapat bahwa adanya sumberdaya sangat berpengaruh terhadap proses kolaborasi (Trisniati et al., 2022). Hal ini selaras dengan pelaksanaannya bahwa sumberdaya yang digunakan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberdayakan APBN, APBD, dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan lain. Selain itu, dukungan SDM di Indonesia tergolong cukup baik dalam menangani masalah stunting, baik dari kementerian, lembaga, dinas, daerah/kota, akademisi, swasta bahkan internasional. Misalnya dalam lingkup kementerian diantaranya Kemenkes, Kemensos, Kementerian Kominfo, dan Kemenag. Di tingkat daerah/kota terdapat Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Badan Pengendalian Penduduk dan KB, hingga puskesmas dan posyandu. Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam penanganan stunting sesuai dengan programnya, baik dalam melaksanakan pembangunan prasarana kesehatan, menyediakan obat dan pangan yang bergizi, mengadakan sosialisasi terkait kesehatan, dan lain-lain.

### **Dampak Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting**

*Collaborative governance* yang merupakan suatu langkah yang dilakukan Indonesia untuk melakukan penanganan stunting. Dimana dalam

hal ini antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait yang terlibat, bahkan pihak-pihak lain pun sangat dibutuhkan perannya untuk bersama-sama melakukan penanganan stunting di Indonesia. Dalam penyelenggaraan kolaborasi penanganan stunting ini tentunya terdapat dampak yang dirasakan, diantaranya penurunan angka stunting di Indonesia mencapai target turunya angka stunting di Indonesia. Dalam hal ini dibuktikan dengan data Kemenkes RI (2023) pada tahun 2021 jumlah stunting di Indonesia menurun, senilai 1,6% di tiap tahun. Yang mana dari angka 27,7% di tahun 2019 turun menjadi senilai 24,4% di tahun 2021. Selanjutnya turun kembali menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Prevalensi tersebut mengalami penurunan dengan nilai 2,8 persen dibandingkan prevalensi di tahun 2021 dengan nilai 24,4 persen.

Selain itu, dampak lain adanya kolaborasi dalam penanganan stunting di Indonesia yakni masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan mengerti informasi-informasi yang berhubungan dengan stunting. Dimana dalam menyebarkan informasi-informasi tersebut melalui beberapa media untuk menyebarkannya kepada masyarakat, seperti website, instagram, youtube, atau forum GenBest, yang dapat dibuka melalui website yang bernama genbest.id, akun medsos @genbestid dan @infokompk. Selain itu juga terdapat aplikasi yang dapat diunggah melalui android yaitu Aplikasi Anak Sehat. Dimana media informasi tersebut bisa dengan mudah digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mencari informasi seputar stunting.

### **Hambatan pada Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting**

Dalam mencapai penurunan angka stunting di Indonesia, tentunya terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan stunting di Indonesia. Padahal masalah stunting ini menjadi suatu program Prioritas Nasional yang memiliki target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 senilai 14 persen. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap keberhasilan proses kolaborasi. Adapun faktor yang menghambat proses kolaborasi dalam penanganan stunting di Indonesia, yakni usia, wawasan dan pengetahuan, dan kurangnya keterlibatan pihak lain.

Faktor yang pertama menjadi hambatan yakni usia. Dimana pada usia remaja, khususnya wanita kurang memperhatikan kesehatan dirinya. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai program dengan memberikan tablet tambah darah kepada remaja perempuan khususnya yang masih bersekolah (Promkes Kemkes, 2022). Namun, masih

banyak remaja-remaja perempuan yang sudah diberikan tablet tambah darah tetapi lupa atau memang tidak diminum, padahal pada usia remaja perempuan terkadang kekurangan nutrisi atau gizi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti anemia. Dari persoalan tersebut terlihat bahwa kurangnya dukungan dalam program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Faktor yang memicu masalah stunting juga berasal dari pengetahuan ibu yang rendah dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan dalam memberikan gizi yang sehat untuk anaknya (Media Center Palangkaraya, 2022). Padahal pemahaman ibu sangat penting dan berpengaruh. Pemahaman dan pengetahuan ibu yang kurang tentang kesehatan bahkan gizi atau nutrisi sebelum mengandung, makanan yang bergizi, perlunya melakukan olahraga, dan lain-lain merupakan penyebab stunting. Hal tersebut dapat terjadi karena tingkat pendidikan ibu. Dimana apabila seorang ibu yang berstatus pendidikannya tinggi, dirinya akan lebih mudah mengerti dan mudah diberikan pengertian yang berkaitan dengan kesehatan seperti bagaimana seorang ibu harus memperhatikan asupan nutrisi dan gizi. Hal ini mungkin akan berbeda jika dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah didalam memahami informasi tersebut.

Selain itu, penanganan stunting tidak akan maksimal hasilnya apabila hanya diselenggarakan oleh satu pihak saja, atau dalam masalah ini adalah pihak di bidang kesehatan. Namun, perlu kerja sama dan kolaborasi antar pihak-pihak lain dalam penanganan stunting. Seperti, kementerian, lembaga, akademisi, swasta, pemerintah dari tingkat daerah, kabupaten, bahkan desa (Indonesiabaik.id, 2020). Mengingat bahwa permasalahan stunting ini merupakan permasalahan yang harus dengan sigap ditangani dan sangat perlunya keterlibatan semua pihak. Keterlibatan swasta yang menjadi salah satu pertimbangannya, dimana pemerintah dapat menggerakkan swasta untuk ikut serta melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau gerakan sosial yang dilaksanakan oleh swasta kepada masyarakat yang berguna untuk mengatasi masalah nutrisi dan gizi, seperti mengadakan pembangunan fasilitas. Sehingga sangat penting peran dari semua lapisan di Indonesia dalam penanganan stunting.

## KESIMPULAN

Inisiatif pencegahan stunting di Indonesia tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat dari berbagai bidang kehidupan. Untuk mengatasi ma-

salah stunting, banyak kementerian dan lembaga di pusat dan daerah, serta masyarakat harus berkolaborasi. Pemerintah Indonesia menyinergikan antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi permasalahan stunting ini. Kolaborasi tersebut mulai dari Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemensos, Kemenag, Kemdikbud, BKKBN, TNP2K, BPOM, dan kementerian dan lembaga lainnya didalam menggapai tujuan SDGs pada nomor dua. Bahkan, banyak entitas non-negara yang dapat terlibat. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya keterlibatan dari semua pihak di Indonesia yang mempunyai tekad yang sama untuk menurunkan prevalensi angka stunting di Indonesia.

Dari adanya kolaborasi yang dilakukan kementerian dan lembaga Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Bahkan, Indonesia terdapat banyak aturan dan kerangka regulasi untuk penanggulangan masalah stunting. Sehingga dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan lagi. Selain kolaborasi kementerian dan lembaga, semua pemangku kepentingan juga harus terlibat dalam penanganan stunting di Indonesia, mulai dari swasta, sektor komersial, akademisi, dan semua lapisan masyarakat. Dengan adanya sinergitas dan kolaborasi yang optimal dari semua lapisan masyarakat di Indonesia harapannya dapat mencapai zero stunting di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2021). A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315238>
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 04(02), 112–127.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriska, L., Husni, V. H., Anggara, J., & Fadlli, M. D. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mencapai SDGs Desa (Studi Kasus Penurunan Tingkat Stunting Di Desa Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal*

- Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 82–90.  
<https://doi.org/10.29303/konstanta.v1i2.365>
- Arifin, S., & Utami, D. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(3), 315–332.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Asri. (2023). Selain Stunting, Ini Deretan Masalah Gizi yang Kerap Dialami Balita di Indonesia. *Reaktifnews.Com*.  
<https://www.reaktifnews.com/selain-stunting-ini-deretan-masalah-gizi-yang-kerap-dialami-balita-di-indonesia.html>
- Bonso, H., & Irwan. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Governance and Politics (JPG)*, 1(2), 1–9.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 48–64.  
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(1), 83–88.  
<https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207>
- Candarmaweni, & Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). Collaborative Governance to Achieve SDGs Social Development: Preventing Stunting Lesson From Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, 211, 1–9.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. 1–27.
- Community, C. P. for S. (2016). *PT Holland for Water (NAZAVA) dan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN): Program Baduta: Bagaimana Air Bersih Membantu Mengurangi Stunting (Balita Pendek)*.
- Damayanti, R., Nugroho, A. B., Triarda, R., & Sari, I. P. (2021). Konteks Sosial-Kepercayaan & Warisan Kelembagaan: Faktor Berkembangnya Stunting Di Tingkat Lokal. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 5(2), 129–148.  
<https://doi.org/10.24198/jsg.v5i2.32119>
- Ditjen Dikti. (2021). *Peran Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Stunting di Indonesia*.  
<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/peran-pendidikan-tinggi-dalam-mendukung-penanganan-stunting-di-indonesia/>
- DPMPTSP Kulonprogo. (2019). *Good Governance*.  
<https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/507/good-governance>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747.  
<https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fauzi, A. R., & Sri Rahayu, A. Y. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887>
- Global Nutrition Report. (2023). *Country Nutrition Profiles*.  
<https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/indonesia/>
- Hendriana, D., & Subarkah, M. A. (2023). Peran Ilmu Pengetahuan Dan Pengaruh Kemajuan Teknologi Digital Dalam Pelaksanaan Tugas Kekhalifahan Manusia. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 19(1), 55–65.  
<https://doi.org/10.31000/rf.v19i1.7730>
- Indonesiabaik.id. (2020). *Kolaborasi Turunkan Stunting*.  
<https://indonesiabaik.id/infografis/kolaborasi-turunkan-stunting>
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(3), 383–391.  
<https://doi.org/10.30872/jkin.v18i3.9665>
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Inklusif Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 171–178.  
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8260>

- Kemendikbud. (2020). *Kemendikbud Tekan Angka Stunting Melalui PAUD Holistik Integratif*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/kemendikbud-tekan-angka-stunting-melalui-paud-holistik-integratif>
- Kemenkes. (2018). Cegah Stunting Itu Penting! In *Warta Kesmas* (pp. 1–27). <https://doi.org/10.54339/jurdikmas.v4i2.417>
- Kemenkes RI. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Kemenkeu. (2023). *APBN Targetkan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tiga Intervensi*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Targetkan-Percepatan-Penurunan-Stunting>
- Kemenkeu RI. (2022). *Pendanaan Program Penurunan Stunting*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>
- Kementerian Agama. (2023). *Mau Nikah? Disarankan Tiga Bulan Sebelumnya Laporan ke KUA*. <https://jateng.kemenag.go.id/2023/04/mau-nikah-disarankan-tiga-bulan-sebelumnya-lapor-ke-kua/>
- Kementerian Desa dan PDTT. (2021). *SDGS Desa 100 Persen Tangani Stunting Di Desa*. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4048/sdgs-desa-100-persen-tangani-stunting-di-desa>
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Ditjen Kesmas Sukses Gelar Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting 2023*. <https://promkes.kemkes.go.id/ditjen-kesmas-sukses-gelar-sosialisasi-kebijakan-intervensi-percepatan-penurunan-stunting>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Kejar Penurunan Stunting, Bappenas Tetapkan Seluruh Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Fokus Tahun 2022*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/kejar-penurunan-stunting-bappenas-tetapkan-seluruh-kabupatenkota-sebagai-lokasi-fokus-tahun-2022-k5VZ8>
- Kementerian PUPR. (2019). *Kementerian PUPR Bangun 3 Program Padat Karya untuk Mencegah Stunting di 60 Kabupaten/Kota*. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-bangun-3-program-padat-karya-untuk-mencegah-stunting-di-60-kabupaten-kota>
- Kominfo. (2019). *Ajak Pelajar dan Stakeholder Kementerian Kominfo Kampanye Cegah Stunting*. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/19708/ajak-pelajar-dan-stakeholder-kementerian-kominfo-kampanye-cegah-stunting/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19708/ajak-pelajar-dan-stakeholder-kementerian-kominfo-kampanye-cegah-stunting/0/sorotan_media)
- Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits Of Collaborative Learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 31(2012), 486–490. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.091>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 1–58. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i11.474>
- Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 5–118. <https://doi.org/10.31258/jkp.v10i2.7870>
- Media Center Palangkaraya. (2022). *Pengetahuan Orangtua Penting Cegah Stunting*. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/peng-etahuan-orangtua-penting-cegah-stunting/>
- Menpan. (2023). *Kolaborasi Kementerian PANRB, Kemenkes, dan BKKBN Akselerasi Penurunan “Stunting”*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kolaborasi-kementerian-panrb-kemenkes-dan-bkkbn-akselerasi-penurunan-stunting>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Moto, M. M. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(1), 24–45. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060>
- Mustiasih, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Penyebaran Tuberkulosis Paru Di Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(07), 876–882.
- Permatasari, A., Sofyan, N., & Walinegoro, B. G.

- (2022). Stunting Prevention Through Collaborative Governance in the Berbah Sub-district, Sleman. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*, 618–628. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7>
- Promkes Kemkes. (2022). *Cegah Anemia Pada Remaja Putri dengan Tablet Tambah Darah*. <https://promkes.kemkes.go.id/cegah-anemia-pada-remaja-putri-dengan-tablet-tambah-darah>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audina, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*, 4(1), 133–137.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(2), 68–85. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30594>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *JPI: Jurnal of Political Issues*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Satriawan, E. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*.
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan Volume*, 1(1), 80–95.
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8218>
- SPKO Kemenkes. (2019). *Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala*.
- Sri Hajjah Purba. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat*.
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran. *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4086>
- Tampanguma, K. S., Kalangi, J. A. F., & Rogahang, J. J. (2020). Kolaborasi Bisnis terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus di Desa Lalumpe. *Jurnal Productivity*, 1(4), 322–327.
- TNP2K, & Indonesia, S. W. P. R. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. 1–96.
- Trisniati, E., Cadith, J., & Sapto Nugroho, K. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal Governansi*, 8(1), 59–68. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.4379>
- Umabaihi, H. I., Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10286–10300. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9936>
- UPK Kemenkes RI. (2021). *Kementerian Kesehatan Rilis Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. <https://upk.kemkes.go.id/new/kementerian-kesehatan-rilis-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2022>
- Widaryanti, R. (2019). Makanan Pendamping Asi Menurunkan Kejadian Stunting Pada Balita Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 3(2), 23–28. <https://doi.org/10.36409/jika.v3i2.35>
- Yasinta, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Zurhayati, & Hidayah, N. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.36341/jomis.v6i1.1730>